

PERAN PERGURUAN TINGGI, PEMERINTAH DAN INVESTOR DALAM MEMBANGUN WISATA PEDESAAN DI JAWA BARAT SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KEMISKINAN

Dede R. Oktini*

Abstrak

Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat semakin lama semakin bertambah, sumber mengatakan bahwa pada bulan Februari 2005 tingkat kemiskinan di Jawa Barat hanya 16 %, sedangkan per Juli 2005 naik menjadi 18,7% dan estimasi sementara untuk maret 2006 mencapai 22 %. (www.bps.co.id). Jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan, misalnya saja pada tahun 2005 persentase kemiskinan di perkotaan hanya 11,37 % sedangkan di pedesaan mencapai 19,51 %. Demikian pula pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin yang ada di pedesaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Fenomena kemiskinan ini juga tampak dari aktivitas sehari-hari yang mana di pedesaan lebih terlihat bahwa banyak orang yang hanya menghabiskan waktu dengan duduk-duduk, sementara gadis dan pemudanya berkumpul di pos-pos ronda mengobrol hal-hal yang kurang bermanfaat.

Kondisi buruk seperti ini tentunya tidak bisa dibiarkan dan masyarakat pedesaan khususnya di Jawa Barat tidak bisa tinggal diam hanya mengharap belas kasihan dari pemerintah, namun harus segera bergerak untuk berupaya terlepas dari kemiskinan yang membelenggu. Di setiap daerah di Jawa Barat memiliki potensi yakni lahan pertanian seperti sawah, kebun dan ladang yang hingga saat ini hanya dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dasarnya saja yaitu menanam padi dan tanaman lain, padahal sebenarnya lahan-lahan tersebut dapat lebih dimanfaatkan misalnya dijadikan lokasi pariwisata pedesaan tradisional. Namun demikian untuk mewujudkannya tentu diperlukan dukungan dari berbagai pihak yakni Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia / masyarakat setempat sebagai calon pramuwisata atau calon wirausaha, penghubung antara calon pramuwisata/wirausahawan dengan pihak investor, sedangkan pemerintah berperan

* **Dede R. Oktini, SE, M.Si.**, adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unisba

dalam menyediakan infrastruktur seperti jalan raya, listrik serta mendidik masyarakat agar lebih mencintai alam pedesaan. Sedangkan investor berperan dalam penyediaan modal baik pembebasan tanah maupun modal kerja bagi calon wirausahawan dalam rangka mewujudkan kawasan wisata yang diinginkan. Bila keempat pihak ini (masyarakat desa, Perguruan Tinggi, pemerintah dan investor) dapat bekerjasama dengan baik maka akan terjadi suatu sinergi sehingga diharapkan kemiskinan dapat ditanggulangi.

Kata kunci : Perguruan Tinggi, Pemerintah, Investor, Wisata Pedesaan, Masyarakat Desa

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah merdeka selama 62 tahun lamanya, jika diibaratkan bahwa Indonesia itu adalah manusia maka negara ini seharusnya telah memasuki usia lanjut yang berarti untuk ukuran sebuah negara selayaknya sangat matang baik dari aspek mental, material maupun spiritual.

Pembangunan di Indonesia memang telah mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang walaupun sempat pula mengalami keterpurukan sejak tahun 1997, namun akhir-akhir ini bank dunia menilai ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang amat pesat, sukses dalam menurunkan anggaran pembayaran hutang, mampu meningkatkan pendapatan negara. Keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan perekonomian sekarang ini mengesankan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk. Namun apabila dianalisis lebih mendalam ternyata yang mengalami peningkatan itu adalah investasi luar negeri, perhitungan ini diperoleh sebagai konsekuensi digunakannya PDB (Produk Domestik Bruto) sebagai unsur pendapatan negara. Kondisi ini menandakan bahwa yang makmur itu adalah warga negara asing yang berada di Indonesia dan melakukan aktivitas ekonomi dan bukan penduduk Indonesia itu sendiri (Sutjipto, Pikiran Rakyat, 2007).

Kondisi seperti ini tentu saja sangat menyedihkan karena orang asing yang mengeruk sumber daya kemudian mereka pula yang menikmati, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri baik yang berada di perkotaan maupun di pedesaan tetap berada dalam belenggu kemiskinan. Jika dibandingkan kemajuan di perkotaan lebih baik daripada di pedesaan, pembangunan di perkotaan meliputi pendidikan, kesehatan, jasa perbankan,

teknologi dan sebagainya, namun demikian di pedesaan atau pedalaman seakan-akan tidak pernah tersentuh oleh perkembangan zaman dan luput dari perhatian pihak-pihak yang semestinya wajib memperhatikan perkembangan pedesaan.

Di pedesaan banyak dijumpai orang-orang menghabiskan waktu dengan duduk-duduk dan bermain di setiap serambi rumah menghitung orang lewat, tidak ada pekerjaan, tidak ada kesempatan mengecap pendidikan, tidak memiliki banyak pilihan. Sementara itu pemuda-pemuda dan gadis-gadis yang masih belia menghabiskan waktu dengan duduk-duduk di Pos Ronda sambil mengobrol hal-hal yang tidak bermutu sehingga waktunya dari hari ke hari terbuang sia-sia. Kondisi tersebut menunjukkan betapa masyarakat Indonesia benar-benar terpuruk tidak berdaya dalam kemiskinan yang semakin hari dirasakan semakin parah, diperparah lagi oleh kebijakan pemerintah yang terus menerus meningkatkan harga berbagai produk.

Keadaan seperti ini tentunya tidak bisa dibiarkan dan masyarakat pedesaan khususnya di Jawa Barat tidak bisa tinggal diam hanya mengharap belas kasihan dari pemerintah atau menunggu kebijakan yang “ramah”, namun harus segera bergerak menggeliat untuk berupaya terlepas dari belenggu kemiskinan tadi, namun untuk mewujudkannya tentu diperlukan dukungan dari berbagai pihak.

Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan ilmiah wajib membantu negara dalam memberikan kontribusi demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur berlandaskan iman dan takwa. Namun tentunya Perguruan Tinggi tidak dapat melakukannya sendirian melainkan harus dibantu oleh berbagai pihak terutama pemerintah dan investor. Ketiga pihak ini jika digabungkan bersama-sama akan menjadi suatu sinergi yang kuat yang diharapkan mampu bahu-membahu dalam mengentaskan kemiskinan khususnya di pedesaan Jawa Barat sesuai dengan perannya masing-masing.

Jawa Barat bila dicermati sebenarnya merupakan wilayah yang memiliki area dan potensi wisata alam yang luas dan beragam, bahkan merupakan salah satu dari 10 daerah tujuan wisata utama di Indonesia yang paling banyak diminati. Dengan alam dan budaya yang dimiliki, Jawa Barat menawarkan berbagai daya tarik wisata. Selain itu ditunjang oleh potensi pasar wisatawan Jawa Barat juga tidak kalah besarnya mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang tinggi. Wisata alam, budaya maupun buatan tersebar di wilayah Jawa Barat, dengan keunikan lokal yang khas yang

memperkuat daya saing produk wisata Jawa Barat. Keragaman daya tarik Jawa Barat dinyatakan dengan GURILAPS (Gunung, rimba, air, laut, pantai, sungai dan seni budaya).

Potensi wisata lainnya yang sampai saat ini belum banyak dimanfaatkan dan belum berkembang adalah wisata pertanian, termasuk didalamnya tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang sebenarnya dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata Agro. Di lihat dari penggunaan lahan di Jawa Barat sebenarnya penggunaan lahan untuk pertanian mencapai lebih dari 60%.

Berdasarkan latar belakang diatas, tampak bahwa pada satu sisi kemajuan dicapai di perkotaan, namun di sisi lain keterbelakangan/ketertinggalan dan kemiskinan masih banyak. Namun mengingat kondisi alam yang kaya raya, sebetulnya kemiskinan/ketertinggalan tersebut dapat di singkirkan karena masih banyak potensi-potensi wilayah di Jawa Barat yang belum dimanfaatkan terutama tanah-tanah pertanian seperti sawah, ladang, kebun di pedesaan untuk dijadikan sebagai objek dan daya tarik wisata dimana terhadap objek tersebut diberikan sentuhan-sentuhan dari masyarakat lokal/ setempat yang berfungsi sebagai nilai tambah pariwisata pedesaan. Tulisan ini akan membahas bagaimana peran Perguruan Tinggi, Pemerintah dan Investor dalam membangun wisata pedesaan di Jawa Barat sebagai upaya mengurangi kemiskinan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana potensi wisata pedesaan di Jawa Barat ?
- b. Bagaimana gambaran wisata pedesaan yang ingin dibangun ?
- c. Bagaimana peran Perguruan Tinggi, Pemerintah dan Investor dalam membangun wisata pedesaan Jawa Barat sebagai upaya mengurangi kemiskinan ?

1.3 Landasan Teori

Menurut I Putu Gelgel (2006) Pemerintah mengatur kepariwisataan di dalam suatu produk perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan. Sedangkan pelaksanaannya diatur dalam

Peraturan Pemerintah No.67 tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Implementasi lebih lanjut diatur dalam Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri.

Tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan seperti yang diatur dalam pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata.
- b. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar negara
- c. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja
- d. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- e. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kepariwisataan harus dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
- b. Nilai-nilai agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- c. Kelestarian budayadan mutu lingkungan hidup
- d. Kelangsungan usaha pariwisata.

Sedangkan wisata pedesaan menurut I Gede Ardika (2007) bercirikan:

- a. Perjalanan yang berorientasi menikmati suasana kehidupan pedesaan.
- b. Menghormati serta memperoleh nilai tambah hidup dari budaya, tradisi masyarakat setempat dan lingkungan alamnya.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
- d. Kehidupan sehari-hari masyarakat setempat dan lingkungannya merupakan objek dan daya tarik wisata.

Untuk mengembangkan pariwisata pedesaan terdapat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu :

- a. Prinsip pokok wisata pedesaan
- b. Kriteria dasar pengembangan wisata pedesaan

- c. Prinsip perencanaan wisata pedesaan
- d. Prinsip keterlibatan masyarakat desa.

Aspiranti (2007) berpendapat bahwa prinsip pokok wisata pedesaan adalah menumbuhkan kecintaan penduduk setempat dan wisatawan terhadap budaya, tradisi dan lingkungan setempat. Sementara itu kecintaan terhadap budaya, tradisi dan lingkungan mulai luntur pada generasi muda. Generasi muda bahkan kurang memahami budaya warisan leluhur disebabkan masuknya budaya asing ke daerah-daerah sebagai dampak keunggulan teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran berbagai teknologi yang memudahkan transfer informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi *borderless* dan secara langsung memudahkan terjadinya *transfer* budaya terutama budaya barat. Budaya barat yang diterima oleh generasi muda cenderung bukan sebagai motivator modernisasi atau alih teknologi positif melainkan lebih sebagai westernisasi perilaku dan gaya hidup. Generasi muda menjadi lebih dekat dengan budaya barat dalam rutinitas kehidupannya, yang terlihat pada nilai-nilai yang dianut dan aplikasinya pada perilaku. Hal ini mengaburkan identitas dirinya sebagai anak bangsa yang sebenarnya mempunyai budaya sendiri yang khas. Upaya yang dapat dilakukan adalah melibatkan generasi muda dalam kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya pedesaan yang berhubungan dengan pariwisata. Kegiatan tersebut dapat berupa menjaga kelestarian lingkungan dan memasyarakatkan *home stay* dengan memelihara keunikan etnik lokal dengan bahan-bahan lokal, melakukan kaderisasi dari generasi tua untuk penguasaan kesenian lokal (tarian, alat musik, produk kesenian misalnya lukisan, batik, kerajinan) dan makanan khas lokal.

Kriteria dasar pengembangan wisata pedesaan adalah dengan memunculkan keberadaan objek dan daya tarik wisata desa yang dikaitkan dengan paket perjalanan yang sudah ada. Upaya mengkaitkan objek dan daya tarik wisata desa menjadi efektif apabila akses fisik dan akses pasar mudah diraih. Pembangunan infrastruktur fisik untuk mengakses objek dan daya tarik wisata tampaknya menjadi urgen dilakukan. Potensi kemitraanpun perlu dilakukan apabila objek dan daya tarik wisata baru akan dibuka. Untuk objek dan daya tarik wisata yang masih baru, akan sangat rentan tanpa adanya dukungan kemitraan dari paket perjalanan yang sudah ada. Sistem klustering objek dan daya tarik wisata desa dengan paket perjalanan dapat dijadikan alternatif objek untuk memperkuat paket perjalanan lama dan memperkenalkan objek dan daya tarik wisata baru. Klustering akan

menjadikan bersinerginya paket perjalanan wisata lama dengan objek dan daya tarik wisata baru.

Prinsip perencanaan wisata pedesaan adalah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, memperhatikan daya dukung, menggunakan bahan-bahan operasional yang ramah lingkungan (*recycle*). Hal ini terkait dengan keharusan menjaga kelestarian dan penghijauan lingkungan dalam pariwisata (*green tourism*), tidak mengeksploitasi alam, mendidik masyarakat desa lebih memperhatikan sanitasi lingkungan dan kehidupan sehat. Lingkup wisata pedesaan yang perlu dijaga yaitu alam (gunung, lembah, hutan, tebing, bentang alam flora dan fauna, taman laut) dan lingkungan pedesaan yang asri dan terjaga akan mendukung kedatangan wisatawan dan lamanya wisatawan tinggal.

Prinsip keterlibatan masyarakat desa adalah dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek kegiatan pariwisata. Selama ini daerah wisata seringkali didominasi oleh pendatang, sementara masyarakat setempat belum dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan akomodasi pariwisata.

Pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) dapat diaplikasikan melalui pengembangan usaha mikro dan kecil di bidang pariwisata pedesaan. Jenis usaha mikro dan kecil yang dapat dikembangkan yaitu :

- a. Akomodasi pondok wisata (*home stay*) dengan tetap memperhatikan keunikan lokal.
- b. Usaha makanan dan minuman dengan menonjolkan alat, penyajian, menu dan bahan setempat dengan pengolahan higienis.
- c. Usaha atraksi pariwisata, olah raga air, menangkap ikan, kegiatan di sawah, di hutan, membuat cinderamata (kerajinan tangan / hiasan-hiasan, kaos-kaos khas desa) dengan melibatkan wisatawan.

2 Pembahasan

2.1 Potensi Wisata Pedesaan Di Jawa Barat

Setiap wilayah di Jawa Barat memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata khususnya lahan-lahan pertanian seperti sawah, ladang dan kebun yang mana sampai saat ini pemanfaatannya belum optimal, namun hanya sebatas fungsi dasarnya saja yakni sebagai lahan

pertanian, padahal sebenarnya selain dapat dimanfaatkan sesuai fungsi dasarnya, juga dapat dimanfaatkan sebagai objek dan daya tarik wisata sehingga dapat memberikan tambahan penghasilan bagi penduduk setempat. Berikut ini akan disajikan data tentang luas lahan sawah yang dimiliki setiap kabupaten di Jawa Barat.

Luas lahan sawah (dalam Ha) menurut kabupaten di Jawa Barat

No	Kabupaten	Irigasi teknis (Technical Irrigation)	Irigasi setengah teknis (Semi technical irrigation)	Irigasi sederhana Non technical Irrigation
01	Bogor	4.542	4.746	12.281
02	Sukabumi	4.249	9.229	6.762
03	Cianjur	15.130	6.139	6.135
04	Bandung	12.095	10.651	5.935
05	Garut	9.538	8.850	9.048
06	Tasikmlya	4.331	4.269	4.790
07	Ciamis	15.290	2.665	7.176
08	Kuningan	4.702	9.224	2.936
09	Cirebon	36.073	8.464	2.670
10	Majalengka	17.434	7.880	5.819
11	Sumedang	3.160	5.112	11.885
12	Indramayu	73.592	11.734	2.976
13	Subang	57.033	10.083	4.650
14	Purwakarta	1.932	2.961	3.183
15	Karawang	80.819	4.637	3.857
16	Bekasi	35.286	7.865	889

Sumber : BPS 2006

Sedangkan berikut ini (h. 299) tabel data tentang sawah tadah hujan, tegal/ kebun dan ladang yang berada di wilayah kabupaten di Jawa Barat.

Jawa Barat juga memiliki peluang pariwisata yang tinggi mengingat banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke objek wisata. Berikut ini akan disajikan data mengenai jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata di Jawa Barat menurut kabupaten

Luas sawah tadah hujan, tegal/kebun dan ladang menurut kabupaten di Jawa Barat

No	Kabupaten	Rain fed Tadah hujan	Garden Tegal/kebun	Dry field Ladang
01	Bogor	15.409	53.888	-
02	Sukabumi	22.918	71.791	37.953
03	Cianjur	21.348	53.906	41.842
04	Bandung	16.853	54.004	1.233
05	Garut	12.447	74.618	27.531
06	Tasikmly	22.886	57.251	24.691
07	Ciamis	12.817	74.364	10.221
08	Kuningan	4.217	16.356	11.444
09	Cirebon	1.526	5.498	1.783
10	Majalengka	6.978	24.250	45
11	Sumedang	6.499	33.544	8.727
12	Indramayu	2.519	6.646	3.652
13	Subang	2.706	23.848	-
14	Purwakarta	1.520	11.526	6.260
15	Karawang	-	9.960	1.201
16	Bekasi	2.176	15.090	885

Sumber : BPS 2006

2.2 Gambaran Wisata Pedesaan yang ingin dibangun

Wisata pedesaan yang ingin dibangun merupakan konsep yang relatif baru yang belum banyak diperkenalkan dan betul-betul sangat tradisional, hal ini mengingat keterbatasan kemampuan warga pedesaan yang akan menjadi pramuwisata. Memperhatikan begitu besarnya potensi wilayah Jawa Barat khususnya lahan pertanian seperti sawah, ladang dan kebun, dimiliki oleh seluruh kabupaten di Jawa Barat dengan luas yang berbeda-beda. Dari ke 16 kabupaten di Jawa Barat ternyata kabupaten Karawang memiliki lahan sawah irigasi teknis (*technical irrigation*) terluas disusul oleh kabupaten Indramayu dan seterusnya, sedangkan sawah dengan semi technical irrigation paling luas dimiliki oleh kabupaten Indramayu disusul oleh kabupaten Subang dan seterusnya. Sawah dengan irigasi sederhana / desa (*non technical irrigation*) paling luas dimiliki oleh kabupaten Bogor dan kabupaten Sumedang dan seterusnya. Sampai saat ini pemanfaatan sawah di Jawa Barat hanya difungsikan sebagai penghasil padi saja, padahal jika lebih

dimanfaatkan lebih jauh lagi tentunya keberadaan sawah tersebut dapat memberikan nilai tambah berupa penghasilan tambahan bagi para pemilik / petani. Pada lokasi tertentu yang dianggap layak untuk dijadikan tempat beristirahat (nyaman, sejuk, rindang, ada pemandangan yang cukup indah, mudah diakses oleh kendaraan bermotor), dapat dibangun suatu kawasan wisata berupa saung-saung tempat berkumpul bersama keluarga atau teman-teman, tentu saja ditempat seperti itu disediakan makanan berat yang unik dan dimasak ditempat, juga dapat dikembangkan makanan khas daerah tersebut atau cinderamata yang produksinya dapat melibatkan pengunjung. Konsep wisata seperti ini kemungkinan dapat berkembang mengingat ditunjang oleh potensi pengunjung khususnya wisatawan domestik yang ternyata tinggi pula, dengan jumlah terbanyak adalah pengunjung ke kabupaten Subang disusul ke Cirebon dan seterusnya (lihat data jumlah pengunjung wisatawan domestik).

Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata di Jawa Barat menurut kabupaten (Number of tourist visits to tourism object in Jawa Barat Regency 2005)

No	Kabupaten	Wisman Foreign	Wisnus Domestic tourist
01	Bogor	8.499	738.028
02	Sukabumi	9.024	363.425
03	Cianjur	40.844	1.057.467
04	Bandung	43.579	1.525.588
05	Garut	4.951	1.264.549
06	Tasikmlya	6.303	644.903
07	Ciamis	15.870	1.160.401
08	Kuningan	381	521.760
09	Cirebon	145	2.299.464
10	Majalengka	102	177.459
11	Sumedang	16.580	267.038
12	Indramayu	0	79.192
13	Subang	4.974	2.403.092
14	Purwakarta	3.107	248.222
15	Karawang	523	483.250
16	Bekasi	0	300

Sumber : BPS (2007)

Konsep wisata pedesaan seperti ini telah dikembangkan di desa Ciroyom, kecamatan Cipeundeuy, kabupaten Bandung Barat, hanya saja ada perbedaan dalam hal lokasi, dimana lokasi yang dipilih adalah di tepi bendungan Cirata. Berdasarkan informasi dari aparat desa setempat mengatakan bahwa tempat wisata ini telah dikembangkan sejak 3 tahun yang lalu dan sampai saat ini mengalami perkembangan. Dalam satu hari pada hari-hari biasa / hari kerja rata-rata jumlah pengunjung mencapai 30 motor dan 10 mobil, sedangkan pada hari sabtu dan minggu rata-rata jumlah pengunjung bisa mencapai 100 motor dan 30 mobil, apalagi jika hari libur besar seperti lebaran, 17 agustus atau hari raya lain bisa melonjak sampai tiga atau empat kali lipat yakni 300-400 motor dan 60-90 mobil dalam sehari. Tentunya keadaan ini sangat membantu mensejahterakan masyarakat setempat yang rata-rata mata pencaharian utamanya adalah petani.

Melihat perkembangan yang dicapai oleh desa Ciroyom dalam membangun kawasan wisata pedesaan tradisional dengan memanfaatkan tepi bendungan, daerah lainpun dapat meniru / mengikuti konsep tersebut, hanya saja dengan menawarkan lokasi yang berbeda, sajian makanan utama bisa serupa namun ditawarkan pula makanan-makanan khas daerah setempat ditambah lagi dengan hasil kreativitas lain yang dapat dibangun bersama-sama dengan memberdayakan pemuda-pemuda dan gadis-gadis yang saat ini masih menganggur, misalnya permainan-permainan disawah, kebun, ladang dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan pendapatan warga pedesaan dapat meningkat sehingga kemiskinan di pedesaan akan berkurang.

2.3 Peran Perguruan Tinggi, Pemerintah dan Investor dalam membangun wisata pedesaan Jawa Barat sebagai upaya mengurangi kemiskinan

Kata “Kemiskinan” bagi rakyat Indonesia merupakan kata yang tidak aneh didengar karena memang setiap hari masyarakat mendengar, melihat, merasakan kemiskinan yang tidak pernah ada ujungnya, bahkan semakin lama semakin miskin. Sejak tahun 1997 masyarakat sudah terbiasa melihat fenomena-fenomena buruk yang mencerminkan ungkapan gejala sebagai akibat kemiskinan itu, yang terkadang bagi orang-orang tertentu yang masih memiliki hati nurani merasa iba, menyedihkan, bingung, takut, khawatir dan sebagainya. Selain itu diperparah lagi dengan kerapnya bencana alam yang banyak menghilangkan harta dan nyawa orang-orang yang masih produktif

sehingga sempurnalah kemiskinan di negara Indonesia tercinta ini. Berikut ini akan disajikan data yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut daerah

Tahun	Jumlah penduduk miskin		
	Desa	Kota	Kota & Desa
1996	24,59	9,42	34,01
1998	31,90	17,6	49,5
1999	32,33	15,64	47,97
2000	26,4	12,3	38,7
2001	29,3	8,6	37,9
2002	25,1	13,3	38,4
2003	25,1	12,2	37,3
2004	24,8	11,4	36,1
2005	22,7	12,4	35,1

Sumber : www.bps.co.id

Sedangkan persentase penduduk miskin di Indonesia menurut daerah adalah sebagai berikut :

Persentase penduduk miskin di Indonesia menurut daerah

Tahun	Persentase penduduk miskin		
	Desa	Kota	Kota & Desa
1996	19,78	13,39	17,47
1998	25,72	21,92	24,23
1999	26,03	19,41	23,43
2000	22,38	14,6	19,14
2001	24,84	9,76	18,41
2002	21,1	14,46	18,2
2003	20,23	13,57	17,42
2004	20,11	12,13	16,66
2005	19,51	11,37	15,97

Sumber : www.bps.co.id

Sumber lain mengatakan bahwa pada bulan Februari 2005 tingkat kemiskinan di Jawa Barat hanya 16 %, sedangkan per Juli 2005 naik menjadi 18,7% dan estimasi sementara untuk maret 2006 mencapai 22 %. (www.bps.co.id)

Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah yang didalamnya banyak terdapat insan-insan yang diberi kemampuan lebih oleh Allah SWT dalam hal keilmuan, moral dan spiritual, tentunya tidak bisa hanya diam saja, tidak cukup hanya membaca untuk sekedar ingin tahu kondisi kemiskinan negara, kemudian tidak mampu berbuat apa-apa, namun harus turut serta berkontribusi bagaimana mengatasi masalah kemiskinan di negara Indonesia khususnya di Jawa Barat ini.

Berkaitan dengan pembangunan wisata pedesaan di setiap wilayah yang memungkinkan memenuhi kelayakan, tentunya diperlukan pramuwisata atau pelaku usaha di kawasan lokasi wisata yang dimaksud dan sudah barang tentu sumber daya manusia itu berasal dari daerah setempat baik itu remaja maupun dewasa, wanita atau pria. Namun demikian, sehubungan dengan konsep yang diambil adalah kawasan wisata, maka para pelaku usahanyapun harus profesional. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi sesuai dengan perannya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat sebaiknya aktif berkontribusi didalam kegiatan-kegiatan menyangkut pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan mendidik, membekali calon-calon wirausaha yang akan mengisi lokasi wisata pedesaan yang dimaksud, agar memiliki kemampuan untuk menjadi insan yang bermanfaat, menjadi wirausahawan yang tangguh, yang dikemas dalam kegiatan pelatihan.

Selain kegiatan pelatihan kewirausahaan, penting juga dibangun kesadaran menyangkut pemupukan kecintaan dan kebanggaannya terhadap kekayaan alam didaerah sendiri sebagai anugrah dari sang pencipta. Hal ini akan berdampak pada peningkatan semangat untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan daya kreasi demi memanfaatkan alam serta menjaga dan memelihara lingkungan agar senantiasa bersih, nyaman dan seimbang, sebagaimana dinyatakan oleh *Dalibard* (dalam Marpaung, 2002) yang berbunyi : Anggota masyarakat harus menerima pariwisata bukan hanya karena manfaat keuangan yang ditimbulkan tapi karena masyarakat merasa bangga akan apa yang mereka miliki dan ingin berbagi dengan orang lain. Pendekatan ini mungkin radikal, hal ini kenyataannya berdasar pada emosi dan kebutuhan manusia yang berusia tua : yaitu rasa bangga dan ingin berbagi. Apabila pariwisata dipandang dari sudut ini, masyarakat akan menggunakan sumber daya dengan sebaik mungkin dan kemudian menawarkan pengalaman yang berarti dan menyenangkan pada wisatawan. Perguruan Tinggi juga dapat berperan sebagai penghubung antara calon wirausaha dengan investor / bank dalam hal penyediaan modal, selain itu

dapat berperan sebagai advisor / penasehat bagi pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan kawasan wisata pedesaan.

Kawasan wisata pedesaan itu sendiri tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah setempat, yakni pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan listrik yang merupakan syarat utama dapat tercapainya harapan terwujudnya kawasan wisata. Pemerintahpun diharapkan dapat mendidik atau menghimbau masyarakat agar belajar mencintai pedesaan melalui pesan-pesan sosial disampaikan melalui media baik media cetak maupun elektronik, terutama pada remaja-remaja masa kini yang telah banyak melupakan desa, melupakan kebudayaan daerah sendiri seakan-akan menganggap bahwa desa dan budayanya merupakan sesuatu yang kurang *prestise*, tidak bergengsi dan sebagainya, cenderung membanggakan kebudayaan luar negeri yang serba modern, lebih memilih tempat-tempat gaul di cafe, restoran, *clubbing* di perkotaan dan sejenisnya. Sedangkan para orang tua dihimbau untuk mengajak anak-anaknya berekreasi ke desa-desa, tanah pertanian sambil memperkenalkan alam ciptaan Tuhan, sehingga orientasi rekreasi itu tidak hanya untuk bersenang-senang saja namun dibalik itu terdapat pembelajaran yakni mentafakuri alam.

Peran investor tentu saja sangat diperlukan untuk mewujudkan wisata pedesaan dalam kaitannya dengan permodalan karena ada proses pembebasan tanah dari para pemilik, adanya kebutuhan modal usaha bagi masyarakat calon pramuwisata/ calon wirausahawan. Bila keempat pihak ini (masyarakat desa, Perguruan Tinggi, pemerintah dan investor) dapat bekerjasama dengan baik maka akan terjadi suatu sinergi sehingga diharapkan kemiskinan dapat ditanggulangi.

3 Kesimpulan dan saran

3.1 Kesimpulan

Fakta mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Barat semakin lama semakin bertambah, pada bulan Februari 2005 tingkat kemiskinan di Jawa Barat hanya 16 %, sedangkan per Juli 2005 naik menjadi 18,7% dan estimasi sementara untuk maret 2006 mencapai 22 %. (www.bps.co.id). Jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan, misalnya saja pada tahun 2005 persentase kemiskinan di perkotaan hanya 11,37 % sedangkan di pedesaan mencapai 19,51 %. Demikian pula pada tahun-tahun sebelumnya jumlah

penduduk miskin yang ada di pedesaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Fenomena kemiskinan ini juga tampak dari aktivitas sehari-hari yang mana di pedesaan lebih terlihat bahwa banyak orang yang hanya menghabiskan waktu dengan duduk-duduk, sementara gadis dan pemudanya berkumpul di pos-pos ronda mengobrol hal-hal yang kurang bermanfaat.

Keadaan seperti ini tentunya tidak bisa dibiarkan dan masyarakat pedesaan khususnya di Jawa Barat tidak bisa tinggal diam hanya mengharapkan belas kasihan dari pemerintah atau menunggu kebijakan yang “ramah”, namun harus segera bergerak menggeliat untuk berupaya terlepas dari belenggu kemiskinan tadi. Di setiap daerah di Jawa Barat memiliki potensi yakni lahan pertanian seperti sawah, kebun dan ladang yang hingga saat ini hanya dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dasarnya saja yaitu menanam padi dan tanaman lain, padahal sebenarnya lahan-lahan tersebut dapat lebih dimanfaatkan misalnya dijadikan lokasi pariwisata pedesaan tradisional. Mengelola wisata pedesaan harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut : *pertama*, bahwa perencanaan wisata pedesaan harus memperhatikan kelestarian lingkungan, memperhatikan daya dukung, menggunakan bahan-bahan operasional yang ramah lingkungan (*recycle*). *Kedua*, keterlibatan masyarakat desa adalah dengan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek kegiatan pariwisata. *Ketiga*, pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*) dapat diaplikasikan melalui pengembangan usaha mikro dan kecil di bidang pariwisata pedesaan.

Namun demikian untuk mewujudkannya tentu diperlukan dukungan dari berbagai pihak yakni Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia / masyarakat setempat sebagai calon pramuwisata atau calon wirausaha, penghubung antara calon pramuwisata/ wirausahawan dengan pihak investor, sedangkan pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur seperti jalan raya, listrik serta mendidik masyarakat agar lebih mencintai alam pedesaan. Sedangkan investor berperan dalam penyediaan modal baik pembebasan tanah maupun modal kerja bagi calon wirausahawan dalam rangka mewujudkan kawasan wisata yang diinginkan. Bila keempat pihak ini (masyarakat desa, Perguruan Tinggi, pemerintah dan investor) dapat bekerjasama dengan baik maka akan terjadi suatu sinergi sehingga diharapkan kemiskinan dapat ditanggulangi.

3.2 Saran

Upaya mewujudkan wisata pedesaan ini tentunya tidak mudah direalisasikan karena harus melalui kerjasama dengan pihak pemerintah yang kemudian dilanjutkan bernegosiasi dengan masyarakat dan investor, namun dapat diprakarsai oleh pihak Perguruan Tinggi, diawali dengan pengajuan proposal kepada pemerintah (Dinas Pariwisata) untuk mengadakan kerjasama / penelitian guna mengetahui potensi setiap wilayah pertanian/ perkebunan di Jawa Barat, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat Studi Kelayakan Usaha untuk setiap wilayah yang terpilih. Upaya selanjutnya tergantung dari keputusan pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- I Putu Gelgel. 2006. *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS – WTO) Aplikasi Hukum & Antisipasinya*, Bandung, reflika ADITAMA.
- Happy Marpaung & Habar. 2002. *Pengantar Kepariwisataaan*, Bandung, Alfabeta
- I Gede Ardika. 2007. *Pembangunan Kepariwisataaan Berbasis Masyarakat*, Makalah
- Jawa Barat Dalam Angka. 2006. BPS Propinsi Jawa Bara
www.bps.go.Id.17 September 2007-09-21
- Tasya Aspiranti. 2007. *Pariwisata Jawa Barat (Potensi & Kendala)*, Makalah